

STRATEGI INDONESIA DALAM MENGHADAPI KEBANGKITAN TIONGKOK SEBAGAI ANCAMAN BAGI KAWASAN INDO-PASIFIK

Dinda Ayuningtyas

Universitas Al-Azhar Indonesia
Jakarta, Indonesia
Dindaayungtyas22@gmail.com

Ramdhan Muhaimin

Universitas Al-Azhar Indonesia
Jakarta, Indonesia

*Correspondent Author

INFO ARTIKEL

Article History

Received

30 June 2022

Revised

8 August 2022

Accepted

30 August 2022

Abstract

This paper aims to find out how the securitization of Indonesia in the face of the rise of China as a threat to the peace of the Indo-Pacific region. Using qualitative research methods and data collection techniques from library research, as well as the Copenhagen School securitization theory. The results of the study show that Indonesia has made efforts to bring about peace in the region, so it was found that Indonesia has a central role in implementing the ASEAN Outlook on Indo-Pacific, Indonesia also always increases the state defense budget to strengthen Indonesia's territorial security, and Indonesia issues a map of the Republic of Indonesia 2017 as a solution. against China in the South China Sea. This is done because the Indo-Pacific region is one of the centers of the world order so that there are many political constellations of interests in this region.

Key Words: *Indonesia's strategy; securitization; China; Indo-Pacific region.*

Kata Kunci: strategi Indonesia; sekuritisasi; Tiongkok; wilayah Indo-Pasifik

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sekuritisasi Indonesia dalam menghadapi kebangkitan Tiongkok sebagai salah satu ancaman bagi kedamaian kawasan Indo-Pasifik. Menggunakan metode penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data studi kepustakaan, serta teori sekuritisasi Copenhagen School. Hasil penelitian menunjukkan ada upaya Indonesia dalam mewujudkan perdamaian di kawasan, sehingga ditemukan bahwa Indonesia ternyata memiliki peran sentral dalam pelaksanaan ASEAN Outlook on Indo-Pacific, Indonesia juga selalu meningkatkan anggaran pertahanan negara untuk memperkuat keamanan wilayah Indonesia, serta Indonesia mengeluarkan peta NKRI 2017 sebagai solusi dalam menghadapi Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan. Hal ini dilakukan karena kawasan Indo-Pasifik merupakan salah satu pusat tatanan dunia sehingga banyak terjadi konstelasi politik kepentingan di kawasan ini.

PENDAHULUAN

Indo-Pasifik secara geografi mengacu pada kawasan luas di antara dua samudera besar yakni Samudera Hindia di sebelah barat dan Samudera Pasifik di sebelah timur dengan Selat Malaka dan perairan teritorial Indonesia yang menjadi penghubungnya. Letaknya yang strategis kemudian membuat kawasan ini menjadi pusat kegiatan geopolitik maritim, keamanan, perdagangan dan lingkungan (Michel & Passarelli, 2014).

Istilah Indo-Pasifik pertama kali diperkenalkan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe pada tahun 2007 dalam sebuah forum diskusi. Ketika istilah Indo-Pasifik diperkenalkan pertama kali, kawasan ini langsung mendapatkan banyak perhatian karena kawasan ini berada di persimpangan jalur perdagangan internasional. Nilai geostrategis kawasan Indo-Pasifik dapat terlihat dari kehadiran pengaruh negara-negara besar di kawasan ini seperti Amerika Serikat, Tiongkok, India, Australia, Jepang, serta negara-negara anggota ASEAN (Iriawan, 2018).

Dengan sumber daya alamnya yang melimpah, kawasan ini juga sering menjadi sasaran negara besar untuk dikuasai. Hal inilah yang kemudian menimbulkan banyak konflik kepentingan di kawasan ini. Sehingga tidak mengherankan apabila kemudian kawasan ini menjadi salah satu

titik panas geopolitik yang sangat kontroversial (Mishra M. K., 2019). Dinamika di Laut Tiongkok Selatan merupakan salah satu titik terpanas dari geopolitik global di Indo-pasifik.

Sikap unilatereisme Tiongkok yang mengklaim sebagian besar perairan Laut Tiongkok Selatan telah melanggar batas-batas kedaulatan, sehingga membuat ketegangan antara negara-negara yang berbatasan semakin meningkat. Apalagi negeri Tirai Bambu tersebut tidak sebatas mengklaim, tapi juga melakukan sejumlah langkah strategis yang menimbulkan ancaman bagi kawasan, seperti reklamasi pulau buatan untuk pangkalan militer di sekitar Kepulauan Spratly dan Paracel (Goh, 2005), pemberian batas imejiner sembilan garis putus-putus (*nine-dash line*) secara unilateral (Ikeshima, 2013), dan pengerahan ratusan kapal nelayan dengan pengawalan kapal-kapal penjaga pantai (*coast guard*) yang dipersenjatai (BBC News Indonesia, 2020).

Tiongkok dalam satu dekade terakhir menunjukkan geliat perkembangan yang signifikan baik di regional maupun secara global. Ketegangan yang terjadi berawal dari kebijakan luar negeri ekonomi-politik Tiongkok yang mendeklarasikan *One Belt One Road* (OBOR) pada tahun 2013, kemudian berubah menjadi *Belt and Road*

Initiative (BRI) tahun 2016 (Rolland & Carson, 2019).

Kebangkitan Tiongkok secara ekonomi dan politik, serta program BRI yang dijalankan Tiongkok berdampak domino terhadap situasi keamanan di wilayah-wilayah yang dilalui oleh jalur koridor-koridor BRI. Sebelumnya, Laut Tiongkok Selatan memang sudah lama menjadi salah satu titik konflik terpanas dalam geopolitik global, tapi hal itu hanya berkaitan dengan sengketa batas kedaulatan perairan. Namun kebijakan OBOR atau BRI, pembangunan reklamasi di Kepulauan Spratly dan Paracel, hingga pengerahan armada nelayan yang dikawal kapal-kapal *coast guard* telah menambah eskalasi ketegangan di kawasan yang menjadi jalur perdagangan terpadat ketiga di dunia tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, Indonesia memiliki peranan penting dalam proses regionalisasi kawasan Indo-Pasifik, yakni Indonesia merupakan salah satu pengadopsi awal dari ide Indo-Pasifik. Hal ini karena adanya kekhawatiran Indonesia terhadap dominasi Amerika Serikat dan Tiongkok di kawasan Asia-Pasifik (Khurana, 2017).

Hal ini kemudian membuat Indonesia memperkenalkan konsep pembatasan signifikansi terhadap integrasi regional Indo-Pasifik, dengan memandang penting pengembangan konsep Indo-Pasifik

melalui ASEAN agar terus dapat mempertahankan sentralitasnya, sehingga nantinya kawasan ini dapat menjadi kawasan yang damai (Ayres, 2019).

Selain itu juga, Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang mengalami pertumbuhan positif dari segi kemakmuran dan kesejahteraan sejak diperkenalkannya istilah kawasan Indo-Pasifik kepada dunia. Indonesia kemudian berperan penting dalam menjaga inklusifitas kawasan Indo-Pasifik dengan menghindari adanya penguasaan kawasan oleh pihak tertentu saja. Hal yang kemudian membuat Indonesia juga harus selalu mengembangkan strategi keamanan militernya di kawasan (Hendrajit, 2019).

Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kesadaran Indonesia terhadap masa depan konflik di Laut Tiongkok Selatan yang terjadi sudah sejak lama, terutama sejak Indonesia menginisiasi proposal Djuanda tentang batas-batas kedaulatan laut tahun 1957, dua tahun setelah kesuksesan Indonesia mengkonsolidasi Dunia Ketiga melalui Konferensi Asia Afrika. Proposal ini muncul dari kesadaran geopolitik Indonesia terhadap kawasan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan (*archipelago state*) terbesar di dunia dengan batas-batas kedaulatan yang sebagian besarnya di perairan. Sementara saat itu, konsepsi negara secara konservatif berdasar pada batas-batas daratan. Meski

proposal ini ditolak Barat (Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Belanda, Australia, dan New Zealand) tahun 1958, pada akhirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations*) mengadopsi juga ketentuan-ketentuan dalam proposal Djuanda menjadi *United Nation Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) tahun 1982 (Djalal, 1996).

Klaim Tiongkok terhadap wilayah di Kawasan Indo-Pasifik didasarkan pada peta klasik Laut Tiongkok Selatan era Kuomintang pada tahun 1947 (US Department of State, 2019), lalu didaftarkan secara resmi oleh Tiongkok ke PBB tahun 2009. Peta ini berbeda dengan dengan batas-batas laut ZEE dan teritorial yang diberikan UNCLOS 1982 ke beberapa negara ASEAN. Hal ini menjadi akar dari persengketaan (*dispute*) berkepanjangan di Laut Tiongkok Selatan. Bagi Indonesia, ketegangan di Laut Tiongkok Selatan ini akan berdampak langsung kepada Indonesia, karena Laut Natuna Utara di Kepulauan Riau yang berhimpitan dengan Laut Tiongkok Selatan. Berikut ini (Gambar 1) merupakan peta klaim tumpang tindih yang terjadi di Laut Tiongkok Selatan.

Gambar 1. Peta Klaim Tumpang Tindih



Sumber: UNCLOS (Meyer, Nurmandi, & Agustiyara, 2019)

Pada grafis peta di atas, sembilan garis merah putus-putus merupakan garis imajiner yang dibuat Tiongkok di dalam peta klasik Laut Tiongkok Selatan 1947 yang didaftarkan ke PBB tahun 2009. Garis putus-putus tersebut menabrak wilayah perairan teritorial maupun ZEE dari beberapa negara ASEAN, termasuk Indonesia. Meskipun Indonesia bersama Malaysia, Filipina, dan Vietnam menolak klaim tersebut, Tiongkok tetap bergeming.

Oleh karena itu, artikel ini membahas mengenai bagaimana strategi kebijakan sekuritisasi yang dilakukan pemerintah Indonesia menghadapi kebangkitan Tiongkok yang dipandang sebagai ancaman di kawasan Indo-Pasifik, khususnya terkait dinamika eskalatif di Laut Tiongkok Selatan. Indonesia memiliki pengalaman dan kepentingan dalam

mewujudkan perdamaian di kawasan Indo-Pasifik, sehingga perlu meningkatkan kontribusinya dalam menjaga keamanan di kawasan (Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia, 2020).

KERANGKA ANALISIS

Sekuritisasi

Mazhab Kopenhagen (*Copenhagen School*) dalam buku berjudul '*Security: A Framework for Analysis*' karya Buzan, Waeber dan Wilde, menjelaskan bahwa terdapat tiga tahapan dalam proses sekuritisasi sebuah isu. Pertama tahap non-politis, yang dalam tahap ini istilah Indo-Pasifik belum diperkenalkan secara internasional sehingga belum menjadi perhatian internasional. Kedua, tahap politis istilah Indo-Pasifik pertama kali diperkenalkan dalam forum internasional, sehingga dengan kekayaannya yang melimpah menyebabkan kawasan ini diperebutkan oleh berbagai negara besar. Tahap yang terakhir yakni tahap tersekuritisasi, yakni setiap aktor baik negara maupun non-negara, menyepakati adanya ancaman terkait isu-isu yang terdapat di kawasan sehingga perlu dilakukan pencegahan untuk mengatasi ancaman tersebut (Buzan, Waeber, & Wilde, 1998).

Berdasarkan pendekatan Mazhab Kopenhagen (*Copenhagen School*), terdapat lima dimensi keamanan dan objek

rujukan (*referent object*), yaitu keamanan sosial, politik, ekonomi, militer dan lingkungan. Sementara *referent object* keamanan merujuk kepada negara dan masyarakat (Buzan, Waeber, & Wilde, 1998).

Dalam karyanya berjudul *Identity, Migration, and the New Security Agenda in Europe*, Barry Buzan mengatakan tentang objek rujukan (*referent object*), "*If a multisector approach to security was to be fully meaningful, referent objects other than the state had to be allowed into the picture*" (Buzan & al, 1993).

Teori sekuritisasi memiliki tahapan-tahapan operasional yang harus dideterminasi. Pertama, proses sekuritisasi. Pada tahapan ini, negara sebagai aktor utama yang terrepresentasikan oleh kepala negara melakukan identifikasi terhadap dinamika fakta yang berlangsung di dalam lingkungan strategisnya. Kepala negara mengukur sejauh mana fakta-fakta tersebut dapat diubah menjadi isu keamanan, baik nyata ataupun persepsi. Dengan kata lain, kepala negara melakukan sekuritisasi terhadap fakta menjadi isu keamanan. Tahapan pertama ini ditandai dengan diperkenalkannya istilah Indo-Pasifik kepada dunia.

Kedua, berbagai kondisi yang memberikan dukungan terhadap terwujudnya proses sekuritisasi sebuah isu (*facilitating conditions*). Pada tahap ini,

harus dipastikan kondisi-kondisi yang berkenaan secara langsung dengan dinamika yang sedang berlangsung sehingga kepala negara ataupun pemangku kepentingan (*stakeholder*) keamanan nasional memandang dinamika tersebut merupakan ancaman dan harus disekuritisasi. Tahapan ini dapat berupa kekayaan alam yang terkandung di dalam kawasan, serta perannya sebagai jalur perdagangan internasional.

Ketiga, unit analisa tentang keamanan (*the units of security analysis*). Tahapan ini menunjuk kepada unit tertinggi dalam *unit level of analysis*, yakni negara. Isu tentang keamanan dalam studi Hubungan Internasional senantiasa berkaitan erat dengan faktor kedaulatan, dan negara adalah pemegang utama kedaulatan. Dengan demikian negara dapat memberikan persepsi terhadap setiap dinamika yang muncul apakah menjadi ancaman terhadap kedaulatan dan kepentingan nasional ataukah tidak.

Sementara objek rujukan (*referent object*) merupakan objek utama yang secara eksistensial dipandang oleh negara harus dikenakan sekuritisasi. Dalam konteks ini, terjadi perdebatan apakah objek rujukan dalam Studi Keamanan merujuk kepada negara (*state*) secara *an sich* ataukah masyarakat (*people*). Objek yang terancam oleh ancaman yang datang adalah negara

atau masyarakat, ataukah negara dan masyarakat merupakan dua objek integral yang tidak dapat dipisahkan. Pilihan-pilihan bergantung pada subjektifitas aktor dalam mengidentifikasi dinamika di lingkungan strategisnya. Menurut Buzan, aktor sekuritisasi dapat siapa saja sepanjang sebagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) ataupun pengambil kebijakan (*policy maker*) strategis dalam negara. Dalam tahapan ini, Indonesia sebagai negara yang memiliki perairan yang berhimpitan langsung dengan Laut Tiongkok Selatan akan terancam oleh kehadiran negara besar dengan kekuatan militernya yang mumpuni di Kawasan Indo-Pasifik ini.

Keempat, tindakan pernyataan (*speech act*). Tindakan pernyataan merupakan aksi untuk mengonstruksi isu menjadi sebuah ancaman keamanan sehingga kemudian dapat memobilisasi kekuatan negara agar dapat menghentikan ancaman yang muncul. Sebagai contoh, jika kepala negara atau menteri suatu negara mengumumkan secara resmi bahwa sebuah peristiwa bencana alam sebagai ancaman, maka segala sumber daya nasional harus diprioritaskan dalam menghadapi ancaman tersebut. Pada tahap ini, *speech act* harus dibuktikan dengan pernyataan langsung dari kepala negara (Buzan, Waeber, & Wilde, 1998). Dalam

tahapan ini, pemerintah Indonesia melakukan sejumlah langkah strategis untuk mengamankan wilayahnya, termasuk dengan memberikan pernyataan resmi atas kondisi di kawasan.

Terakhir, konstelasi sekuritisasi (*constellations of securitization*). Tahapan ini berkaitan dengan pemetaan yang dilakukan negara terhadap unsur-unsur dalam kompleksitas keamanan. Dalam kasus di Laut Tiongkok Selatan, hal tersebut dapat terlihat dari adanya peningkatan kekuatan Tiongkok sehingga menimbulkan ancaman bagi negara-negara yang berbatasan langsung dengan kawasan ini (Muhaimin, 2018).

Pada konteks kebangkitan Tiongkok di Indo-Pasifik, analisa sekuritisasi diarahkan tidak saja kepada bentuk-bentuk kebijakan yang dilakukan Indonesia, tetapi juga bagaimana pernyataan langsung (*speech act*), bentuk-bentuk implemetatif, dan dinamika yang berkembang (*facilitating conditions*) di Indo-Pasifik, terutama di Laut Tiongkok Selatan sebagai lokus representatif dari kebangkitan Tiongkok (*referrent object*). Kebangkitan Tiongkok di Indo-Pasifik dalam kajian ini lebih ditekankan kepada dinamika Laut Tiongkok Selatan, karena kawasan ini berhimpitan langsung dengan kedaulatan wilayah Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang merujuk pada pendapat Lamont (2015). Menurut Lamont, metode kualitatif merupakan jenis eksplanasi atau deskriptif. Hal yang kemudian membuat penulis akan lebih mudah untuk memahami dan memberikan penjelasan terhadap rumusan masalah yang telah dibuat penulis sebelumnya serta mampu menjelaskan peristiwa dan data-data yang ditemukan oleh penulis. Data dan informasi yang ditemukan penulis kemudian ditujukan untuk memberikan gambaran jawaban terhadap rumusan masalah, karena salah satu kelebihan jenis metode kualitatif menurut Lamont ini yaitu mampu memberikan eksplanasi terhadap suatu peristiwa secara mendalam, sehingga kemudian dapat memberikan suatu kesimpulan yang nantinya dapat menjawab rumusan masalah rumusan masalah yang bersifat “bagaimana” (Lamont, 2015).

Sumber data sekunder serta informasi yang penulis dapatkan adalah dari buku, jurnal serta artikel yang terkait dengan strategi sekuritisasi Indonesia dalam menghadapi kebangkitan Tiongkok sebagai ancaman bagi keamanan kawasan Indo-Pasifik.

PEMBAHASAN

Kebangkitan Tiongkok dan Ancaman Bagi Indo-Pasifik

Kebangkitan Tiongkok (*the rise of China*) menjadi kekuatan global saat ini terlihat dari hegemoni ekonomi Negeri Tirai Bambu tersebut melalui mega proyeknya yakni *Belt and Road Initiative* (BRI).

Meskipun dahulunya Tiongkok merupakan negara yang miskin dan terisolasi dari dunia luar, namun sejak diluncurkannya reformasi ekonomi secara masif pada tahun 1978 oleh mantan pemimpin revolusi dalam partai Komunis Tiongkok yakni Deng Xiaoping, Tiongkok kemudian mulai mengalami peningkatan kekuatan secara masif (Morrison, 2019).

Dalam menjalankan reformasinya tersebut, Tiongkok mengeluarkan sejumlah terobosan kebijakan seperti pemberian insentif kepada para petani sehingga mereka dapat menjual hasil pertanian mereka di pasar bebas internasional, menetapkan empat wilayah ekonomi khusus untuk menarik investasi asing, serta meningkatkan ekspor (Bijian, 2005).

Kebijakan tersebut kemudian berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi Tiongkok dari tahun 1978 hingga tahun 2017, dimana terdapat peningkatan *Gross Domestic Product* (GDP) Tiongkok dari \$175 miliar menjadi \$14 triliun,

kemudian pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya juga meningkat menjadi 9,5 persen dengan hasil eksportirnya yang mencapai \$2,26 miliar (World Bank, 2018).

Agenda BRI sendiri merupakan bukti nyata adanya kebangkitan Tiongkok di abad ke 21, yang sebelumnya program ini dikenal dengan sebutan *One Belt One Road* (OBOR). Sehingga kemudian banyak yang menafsirkan BRI sebagai visi geo-ekonomi yang paling ambisius di abad ke 21 yang dijalankan oleh Tiongkok untuk meningkatkan kerjasama dan konektivitas regional lintas benua (Hillman, 2018).

Meskipun banyak yang menganalogikan BRI sebagai '*Chinese Marshall Plan*', namun Tiongkok menolak analogi tersebut. Menurut Tiongkok, biaya yang dikeluarkan untuk BRI ini lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan Amerika Serikat untuk *Marshall Plan* pada tahun 1948 (Qinguo, 2018). *The Tiongkok Development Bank* menginvestasikan sekitar \$900 miliar untuk BRI, sedangkan *Office of The Historian* mencatat bahwa biaya *Marshall Plan* Amerika Serikat di tahun 1948 hanya sekitar \$12 miliar yang setara dengan \$130 miliar di tahun 2015 (Djankov dan Miner, 2016).

Selain itu juga Tiongkok menolak BRI disebut sebagai 'rencana' atau 'strategi', karena bagi Tiongkok, program BRI merupakan terobosan ekonomi (*initiative*)

yang diperkenalkan Presiden Xi Jinping dalam lawatannya ke Kazakhstan dan Indonesia. Dimana kemudian penamaan istilah '*Belt* (sabuk)' merujuk pada pengertian jalur darat yaitu transportasi jalan dan kereta api. Sementara istilah '*Road* (jalan)' merujuk pada jalur laut (Sharma dan Kundu, 2016).

Bagi Tiongkok, digulirkannya agenda global BRI adalah untuk memperkuat hubungan kerjasama infrastruktur, perdagangan dan investasi antara Negeri Tirai Bambu tersebut dengan 65 negara yang secara kolektif menurut Bank Dunia telah menyumbang lebih dari 30 persen PDB global, 62 persen populasi dunia serta 75 persen cadangan energi dunia (World Bank, 2018). Karena itu agenda BRI ini terbentang dari Asia, Afrika hingga ke Eropa. Program ini bertujuan untuk menstimulasi pembangunan ekonomi di kawasan-kawasan tersebut (Korwa, 2019).

Peningkatan kekuatan Tiongkok dalam bidang ekonomi ini juga kemudian membuat Tiongkok sendiri terus berusaha untuk membangun dan memperkuat sistem militernya karena adanya kekhawatiran Tiongkok terhadap penyerangan secara mendadak oleh negara-negara besar seperti Amerika Serikat beserta negara aliansinya (Sukma & Perwita, 2018).

Peningkatan sistem militer Tiongkok ini berkaitan erat dengan adanya

kepentingan Tiongkok untuk melakukan perlindungan terhadap stabilitas keamanan dan politik regional negaranya. Hal ini juga sebagai upaya merespons sistem internasional anarki yang dinamis berubah setiap waktu. Sehingga Tiongkok selalu berusaha untuk memperkuat tentara aktifnya serta terus melakukan modernisasi terhadap angkatan bersenjata Tiongkok (Satris, 2015).

Dalam hal militer, jumlah tentara aktif Tiongkok lebih dari 2,2 juta orang, dengan 800 ribu pasukan cadangan. Kemudian juga dari segi peralatan militer, Tiongkok memiliki 9000 tank, 2.700 pesawat angkut, dan anggaran pertahanan Tiongkok berada di posisi kedua sebagai negara dengan anggaran pertahanan terbesar di dunia, yang hanya terpaut 4,8 persen saja dengan Amerika Serikat (Fathun, 2016).

Modernisasi militer yang dilakukan Tiongkok selain untuk meningkatkan kapasitas senjata dan teknologi militer modern, tapi juga meningkatkan kapasitas institusi, relasi sipil-militer, serta terkait permasalahan lain yang sekiranya mendukung keberadaan peningkatan kekuatan pertahanan militer Tiongkok (Purwanto, 2010).

Oleh karena itu, hampir setiap tahunnya Tiongkok terus meningkatkan anggaran pertahanannya. Dimulai pada tahun 2000 dengan anggaran pertahanan

Tiongkok hanya sekitar 121 miliar yuan atau sekitar \$14.6 miliar, hingga pada tahun 2008, anggaran pertahanan Tiongkok sudah mencapai 417.8 miliar yuan atau sekitar \$57.22 miliar (Global Security, 2021).

Peningkatan anggaran militer Tiongkok menarik perhatian kekuatan-kekuatan utama dunia dan menimbulkan kekhawatiran sejumlah negara besar, terutama negara di kawasan Indo-Pasifik terkait keamanan militer negara mereka (Herz, 1950).

Sejak 2014, Tiongkok sudah secara aktif mulai melakukan sejumlah reklamasi pulau buatan di sekitar kepulauan Spratly dan Paracel. Sebuah pencitraan dari satelit milik lembaga *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS) menunjukkan adanya landasan udara yang dibangun di atas pulau buatan tersebut. Selain itu juga Tiongkok membangun sebuah mercusuar serta membangun pangkalan militer di atas pulau buatan tersebut. Hal ini tentu saja menimbulkan pertentangan sejumlah negara baik yang berbatasan langsung maupun tidak dengan wilayah di sekitar kepulauan Spratly dan Paracel (Pamungkas, 2016).

Selain itu juga, klaim Tiongkok yang mengeluarkan peta sembilan garis putus-putus atau disebut juga sebagai *nine dash line*, menimbulkan berbagai penolakan dari berbagai negara lain. Apalagi kemudian

dengan adanya pengerahan kekuatan militer sebagai sikap tegas Tiongkok terhadap klaim sepihak tersebut di Laut Tiongkok Selatan kemudian menimbulkan berbagai kontroversi baru. Tiongkok mengeluarkan Undang-Undang *Coast Guard* yang memberikan kewenangan bagi mereka untuk bertindak menggunakan senjata terhadap siapapun yang melanggar kedaulatan dan klaim yuridiksi nasional Tiongkok. Tentu saja hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi dunia internasional terutama negara-negara di sekitar wilayah Laut Tiongkok Selatan (Marsetio, 2021).

Hal inilah yang kemudian membuat Indonesia harus memperkuat pertahanan negaranya untuk menghalau setiap kapal militer Tiongkok yang seringkali memasuki wilayah kekuasaan Indonesia, sementara Tiongkok juga melakukan klaim terhadap wilayah utara Kepulauan Natuna yang merupakan wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Ini juga yang kemudian membuat situasi antara Indonesia dengan Tiongkok seringkali 'bersitegang', karena adanya kesadaran Indonesia terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh kebangkitan Tiongkok terhadap kedaulatan wilayah Indonesia di kawasan Indo-Pasifik (Sulistiyani, Pertiwi, & Sari, 2021).

Strategi Indonesia dalam Menghadapi Ancaman di Kawasan Indo-Pasifik

Pada dasarnya prinsip kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif membuat Indonesia kemudian harus menjadi penengah di antara negara-negara yang bersengkata, apalagi dengan posisi Indonesia yang strategis di kawasan Indo-Pasifik kemudian membuat Indonesia tidak boleh memihak salah satu negara yang berkuasa di kawasan ini. Namun di sisi lain juga Indonesia harus selalu berperan aktif dalam tatanan internasional agar eksistensi negara Indonesia terutama di kawasan Indo-Pasifik dapat tetap diakui oleh dunia internasional (Rahman, 2019).

Selain itu juga, kehadiran Tiongkok di wilayah ZEE Indonesia menimbulkan ancaman keamanan bagi kedaulatan NKRI. Hal inilah yang kemudian melatarbelakangi Indonesia untuk melakukan sejumlah langkah strategis baik melalui ASEAN maupun melalui sejumlah kebijakan yang dikeluarkan Indonesia sebagai bentuk sekuritisasi yang dilakukan Indonesia untuk meningkatkan kekuatan militer negara Indonesia serta untuk mewujudkan inklusifitas di kawasan Indo-Pasifik. Lalu, kebijakan sekuritisasi apa saja yang dilakukan Indonesia di kawasan Indo-Pasifik?

Diplomasi Indonesia melalui ASEAN Outlook on Indo-Pasific

Gagasan mengenai *ASEAN Outlook on Indo-Pacific* (AOIP) digagas pertama kali oleh menteri luar negeri Indonesia tahun 2013 yakni Marty Natalewaga. Gagasan ini disampaikan secara umum oleh Presiden Joko Widodo pada masa Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-India pada tahun 2018. Hal ini terjadi karena munculnya berbagai tantangan baru dari eksternal ASEAN di kawasan Indo-Pasifik (Santi, 2018).

Konsep AOIP kemudian disepakati pada sesi pleno KTT ASEAN ke-34 di Bangkok, Thailand pada tahun 2019. Dalam konferensi tersebut Jokowi mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada semua negara anggota ASEAN yang menyepakati adanya *outlook* ini sebagai salah satu upaya untuk mencapai kemakmuran di kawasan. Jokowi mengungkapkan “*Dengan disepakatinya outlook ini, akan menjadi dasar bagi ASEAN dalam mengembangkan kerjasama kongkret dengan berbagai negara ke depannya*” (Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, 2019).

Gagasan ini diusung karena menurut Indonesia, ASEAN merupakan organisasi regional dan sentral di kawasan Asia Pasifik dan Samudera Hindia. Sehingga ASEAN memiliki kepentingan besar dalam rangka menjaga stabilitas dan dinamika

keamanan di kawasan Indo-Pasifik. Karena dalam perkembangannya, kawasan ini terus mengalami perubahan dalam dinamika internasional. Hal tersebut terjadi karena banyaknya kepentingan di kawasan Indo-Pasifik. Sehingga selain menimbulkan keuntungan karena adanya pertumbuhan ekonomi yang aktif, tetapi juga terdapat tantangan keamanan dimana banyaknya aktor besar di kawasan ini menimbulkan ancaman kedaulatan terhadap negara-negara di kawasan regional Asia Tenggara, apalagi kemudian dengan adanya kebangkitan Tiongkok semakin memperjelas adanya ancaman tersebut (Roza, 2019).

Selain itu juga adanya gagasan AOIP ini kemudian akan dijadikan pedoman bagi negara-negara anggota dalam merespons munculnya berbagai proposal Indo-Pasifik lainnya yang diusulkan oleh beberapa negara besar seperti Tiongkok dengan inisiatifnya yaitu *Belt and Road Initiative* (BRI), serta Amerika Serikat dengan gagasan *Free and Open Indo-Pacific* (FOIP) (Agastia & Perwita, 2015).

Munculnya gagasan AOIP juga merupakan salah satu cara Indonesia untuk mencapai kepentingannya nasionalnya melalui ASEAN. Indonesia melihat adanya peluang untuk memperluas cakupan kerjasama di kawasan Indo-Pasifik, serta membawa isu maritim dalam agenda

ASEAN merupakan salah satu cara Indonesia untuk menjadikan negara Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (PMD), yang kemudian akan berdampak pada ekonomi, politik dan ideologi Indonesia (Anwar, 2020).

Karena pada masa pemerintahan Jokowi, cakupan prinsip politik luar negeri Indonesia yaitu 'bebas aktif' dimaknai tidak hanya dalam cakupan regional ASEAN, tetapi juga dalam kawasan Indo-Pasifik (Scott, 2019). Hal ini karena gagasan AOIP merupakan skala prioritas Indonesia dalam memetakan kepentingan nasional negaranya (Montratama, 2016).

Hadirnya Tiongkok beserta inisiatifnya sebenarnya mengancam keamanan laut Indonesia, yang dalam inisiatif tersebut Tiongkok secara unilateral melakukan pemetaan jalur maritim dan perdagangan yang sudah pasti bersinggungan dengan wilayah teritorial Indonesia di Pulau Natuna. Sehingga Indonesia melalui AOIP menginginkan keamanan yang lebih terjamin yang disertai dengan kerangka kerjasama yang lebih jelas serta memiliki ikatan hukum yang berlaku (Pangestu, Hikmawan, & Fathun, 2021).

Karena pada dasarnya, pengajuan peta sembilan garis putus-putus Tiongkok kepada PBB juga menjadi salah satu pemicu perlunya hukum yang mengikat

untuk mempertahankan stabilitas ASEAN di kawasan, terutama di wilayah Laut Tiongkok Selatan. Sengketa antara Tiongkok dengan beberapa negara ASEAN seperti Vietnam, Malaysia, Filipina dan Indonesia dalam permasalahan *nine dash line* ini menjadi pendorong solidaritas antar negara anggota untuk mempertahankan netralitas dan keutuhan ASEAN tanpa terikat oleh kepentingan negara-negara besar (Priangani & Hattu, 2020). Hal inilah yang kemudian menjadi pendorong ASEAN untuk mampu mengambil sikap tegas terhadap segala bentuk aktivitas Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik, terutama di wilayah Laut Tiongkok Selatan. Bahkan menurut Menteri Luar Negeri Malaysia, Datuk Seri Saifuddin Abdullah, menyatakan bahwa klaim Tiongkok terhadap LCS merupakan tindakan konyol. "*Tiongkok mengklaim seluruh Laut Tiongkok Selatan sebagai milik mereka, saya pikir itu konyol*" kata Menteri Luar Negeri Malaysia tersebut (Sebayang, 2020).

Serta yang tak kalah penting, kepentingan Indonesia melalui AOIP adalah agar Indonesia mampu menjaga batas aman dalam menjalin kerjasama dan menjalin hubungan dengan berbagai mitranya di kawasan Indo-Pasifik. Karena dengan posisi Indonesia yang berada tepat di tengah kawasan Indo-Pasifik kemudian

menguntungkan Indonesia untuk menjalin kerjasama (Natalegawa, 2013).

Sehingga pada akhirnya Indonesia melalui adanya gagasan AOIP ini kemudian berhasil menjadikan ASEAN sebagai pemegang sentralitas kawasan regional, serta AOIP ini secara tidak langsung menjadikan Indonesia sebagai pemimpin ASEAN di kawasan Indo-Pasifik. Karena AOIP ini merupakan keberhasilan Indonesia dalam melakukan negosiasi dengan sembilan negara anggota ASEAN (Wulandari, Sushanti, & Putri, 2021).

Minimum Essential Force (MEF)

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyatakan:

"Pertahanan negara diselenggarakan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara" (Undang-Undang Republik Indonesia, 2002).

Kepentingan nasional Indonesia dalam hal ini adalah mencapai kemandirian dalam industri pertahanan sehingga tidak lagi terlalu bergantung pada negara lain. Upaya dalam mencapai kepentingan nasional ini tergambar dalam penetapan skema anggaran pertahanan yang disebut *Minimum Essential Force* (MEF).

Sehingga dengan mengembangkan dan memodernisasi kekuatan, sistem pertahanan Indonesia akan lebih efektif dalam melaksanakan tugas-tugas militer serta melakukan berbagai misi perdamaian. Implementasi MEF sendiri menurut Permenhan No. 19 tahun 2012, diselaraskan dengan sumber daya terbatas melalui upaya revitalisasi industri pertahanan. Melalui modernisasi tersebut diharapkan sistem pertahanan Indonesia ke depan mampu mengatasi ancaman aktual dalam berbagai skala prioritas.

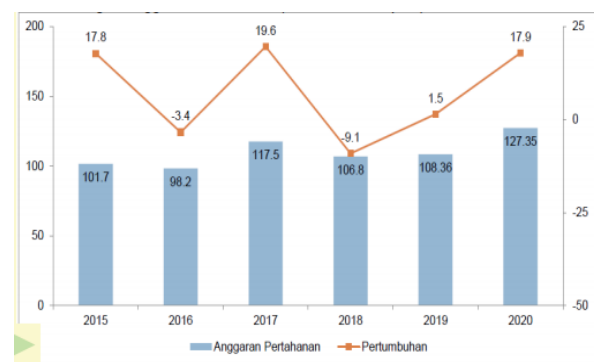
Berdasarkan data *Global Fire Power* (2020), kekuatan militer Indonesia meningkat hingga ke peringkat 16 dari 137 negara. Alutsista milik militer Indonesia rata-rata berada pada peringkat antara 35-50, dan hanya 2 alutsista yang masuk peringkat 5 besar yaitu Corvet dan Fregat.

MEF mulai dicanangkan pemerintah sejak tahun 2007, tapi kebijakannya mulai aktif dilaksanakan sejak tahun 2009, dan terbagi menjadi tiga fase. Fase pertama dijalankan tahun 2010 hingga 2014, fase kedua tahun 2015-2019, dan fase ketiga tahun 2020-2024. Kebijakan MEF ini juga secara aktif selalu didukung konsisten oleh anggaran pertahanan yang cenderung meningkat setiap tahunnya (Zahara & Rizky, 2020).

Anggaran pertahanan Indonesia mengalami peningkatan sejak tahun 2018

dari Rp. 106,8 triliun menjadi Rp. 127,35 triliun di tahun 2020. Alokasi terbesar adalah untuk belanja pegawai yaitu sebesar 41,6 persen, untuk belanja barang sebesar 32,9 persen, dan untuk belanja modal sebesar 25,4 persen. Berikut grafik (Grafik 1) perkembangan anggaran pertahanan Indonesia dari tahun 2015-2020.

Grafik 1. Anggaran Pertahanan Indonesia Tahun 2015-2020



Sumber: Nota Keuangan dan APBN 2020, Kementerian Keuangan

Pada tahun 2021, alokasi anggaran pertahanan Indonesia mencapai Rp. 118,19 triliun, dan meningkat sekitar 13 persen di tahun 2022. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), anggaran pertahanan Indonesia mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 133,92 triliun di tahun 2022. Dari anggaran tersebut, alokasi belanja persenjataan mengalami peningkatan sebesar 33 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dan pada tahun 2022 anggaran belanja senjata akan menjadi sebesar Rp. 32,48 triliun (Andre, 2021).

Peningkatan anggaran pertahanan ini terus dilakukan Indonesia untuk terus meningkatkan keamanan negara sehingga Indonesia dengan posisi strategisnya di kawasan Indo-Pasifik, mampu menjaga keutuhan negara dari segala bentuk ancaman yang dapat menghilangkan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di kawasan (Armawi, 2019). “*Dengan anggaran pertahanan dan keamanan, kita bisa menjaga kedaulatan negara ini*” ungkap Piter Abdullah yang merupakan Direktur Riset *Center of Reform on Economics* (CORE) (Putri, 2021).

Berdasarkan data *Global Firepower* (2020), alat utama senjata tentara nasional Indonesia (alutsista TNI) menyebutkan bahwa kekuatan angkatan udara Indonesia pada tahun 2021 dilengkapi dengan 10 helikopter tempur, 109 unit armada latihan (*trainer*), 40 unit pesawat *fighter*, 17 unit misi khusus, 188 unit helikopter serta 64 unit armada transportasi (Debora, 2021). Sedangkan angkatan darat Indonesia memiliki 332 unit tank, 63 unit peluncur roket, 1.430 unit kendaraan berlapis baja dan 366 unit artileri tarik. Kemudian angkatan laut Indonesia sendiri memiliki 7 unit kapal pengawal (*frigate*), 10 kapal perang tambang (*mine warfare*), 5 kapal selam, 24 kapal korvet dan 179 kapal patroli (Mujiburrahman & Effendi, 2021).

Dalam kepemimpinannya sebagai menteri pertahanan, Prabowo juga membeli

sejumlah alutsista di antaranya adalah 48 jet tempur *Dassault Rafale*, 2 kapal perang *Corvette Gowind* serta 4 kapal selam *Scorpene* dari Perancis. Prabowo juga membeli 11 jet tempur *Sukhoi SU-35* dari Rusia, dan membeli sejumlah alutsista dari Amerika Serikat seperti jet tempur *F-15 Eagle*, jet tempur *F-18 Hornet*, pesawat angkut militer *Hercules C130J* dan *C130H* (Sinaga S. S., 2021).

Posisi geografis yang berada di titik tengah kawasan Indo-Pasifik, membuat Indonesia dapat mencari celah untuk memainkan peranan yang lebih dalam di kawasan ini. Selain itu juga, Indonesia diharapkan mampu berperan aktif dalam menjaga nilai-nilai dan norma internasional di kawasan Indo-pasifik, sehingga kawasan ini dapat terhindar dari nilai-nilai kontestasi antar negara kuat (Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2018).

Indonesia sendiri menyadari bahwa kawasan Indo-Pasifik merupakan kawasan yang dapat memunculkan tantangan bagi pembangunan konsep kawasan yang terbuka, transparan, inklusif, kooperatif (Tuathail & Agnew, 1992). Karena apabila kawasan Indo-Pasifik tidak memiliki landasan yang kuat, maka kawasan ini akan berpotensi untuk menjadi objek tarik-menarik di antara berbagai kekuatan dunia yang menginginkan kekuasaan di kawasan ini (Saputra & Sudirman, 2020).

Oleh karena itu untuk menyikapi permasalahan klaim Tiongkok terhadap wilayah utara kepulauan Natuna, Indonesia membentuk skadron (skuadron) tempur 16 dan 12 untuk mengantisipasi adanya kemungkinan eskalasi konflik dengan Tiongkok di wilayah Natuna. *“Kami sudah siaga, tetapi pergerakan menunggu perintah dari Panglima (TNI)”* ucap Komandan Lanud Roesmin Nurjadin Marsekal Pertama, Ronny Irianto Moningga dalam keterangan persnya (Jaringan Pemberitaan Nusantara Negeriku, 2020).

Penerbitan Peta NKRI 2017

Letak Laut Tiongkok Selatan yang berbatasan langsung dengan wilayah utara kepulauan Natuna membuat Indonesia memiliki hubungan yang tidak stabil dengan Tiongkok di sekitar wilayah ini. Hal ini bermula dari klaim yang dilakukan Tiongkok dengan menerbitkan peta sembilan garis putus-putus di seputar wilayah tersebut. Hal ini kemudian mengganggu stabilitas keamanan dan ekonomi Indonesia, mengingat Indonesia memiliki eksplorasi minyak dan gas bumi di wilayah utara kepulauan Natuna (Ruyat, 2017).

Berbagai langkah dilakukan Indonesia dalam menjaga wilayah utara kepulauan Natuna diantaranya adalah

meningkatkan manajemen perbatasan wilayah, meningkatkan kegiatan ekonomi melalui eksplorasi minyak di wilayah Natuna, serta meningkatkan kapabilitas pertahanannya (Wiranto, 2016).

Namun ternyata semua langkah tersebut belum dapat membuat Tiongkok mundur dalam sengketa perebutan wilayah ini, hingga kemudian pada tahun 2017, dalam penerbitan peta terbaru NKRI, Indonesia mengganti nama Laut Tiongkok Selatan menjadi Laut Natuna Utara. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengamankan wilayah ZEE Indonesia, serta untuk memberikan penegasan kepada negara-negara di sekitar wilayah tersebut termasuk Tiongkok, terkait hukum dan batas laut Indonesia (Ratriani, 2020).

Meskipun kemudian menimbulkan protes keras dari Tiongkok yang menganggap penyebutan nama ini tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan upaya standarisasi penyebutan wilayah internasional, tetapi Indonesia menganggap penggantian nama ini merupakan hak negara Indonesia (Aziza, 2017).

Selain itu juga, Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi menyatakan bahwa *“Indonesia tidak pernah akan mengakui nine dash line, klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok tidak memiliki landasan hukum yang diakui oleh*

hukum internasional, terutama UNCLOS 1982” (BBC News Indonesia, 2021).

Menurut salah satu dosen Hubungan Internasional dari UIN Jakarta, Teguh Santosa, langkah penggantian nama ini merupakan langkah yang tepat untuk menjaga kedaulatan dan kewibawaan negara Indonesia ketika berinteraksi dengan negara lain dalam dunia internasional. Teguh menegaskan bahwa *“Penggunaan istilah laut Natuna Utara itu brilian, sebuah penegasan atas kedaulatan dan memperlihatkan penghormatan Indonesia terhadap kedamaian dan stabilitas kawasan”* (Debora, 2017).

Pembaruan peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini ditetapkan setelah melalui berbagai pembahasan sejak Oktober 2016, hingga kemudian ditetapkan oleh 21 perwakilan kementerian dan lembaga terkait. Peta NKRI 2017 ini berisikan tentang beberapa perubahan dan penyempurnaan atas perkembangan hukum internasional, serta mengenai penentuan batas maritim dengan negara di sekitar perbatasan wilayah Indonesia (Pratomo, 2017). *“Perlunya 'upd ate' penamaan laut yang sudah disepakati ini dilakukan supaya masyarakat internasional mengetahui kalau lewat dia paham itu wilayah mana”* ucap Deputy I Bidang Kedaulatan Maritim Kemenko Kemaritiman, Arif Havas Oegroseno (Jurnal Maritim, 2017).

SIMPULAN

Berbagai langkah strategis yang dilakukan Tiongkok di wilayah Laut Tiongkok Selatan semakin menimbulkan kekhawatiran bagi negara-negara di sekitar wilayah ini, tidak terkecuali Indonesia. Pasalnya klaim Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan juga meliputi wilayah utara kepulauan Natuna, sehingga membuat Indonesia perlu melakukan sejumlah langkah sekuritisasi untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI.

Sekuritisasi yang Indonesia lakukan tercermin dalam diplomasi yang dilakukan Indonesia melalui *Asean Outlook on Indo-Pacific* (AOIP), peningkatan anggaran *Minimum Essential Force* (MEF), serta penerbitan pembaruan peta NKRI pada tahun 2017.

Strategi tersebut dilakukan Indonesia dalam rangka mempersiapkan diri dari adanya kemungkinan ancaman yang dapat mengancam kedamaian kawasan Indo-Pasifik, serta merupakan langkah dalam mewujudkan kawasan Indo-Pasifik menjadi kawasan yang kooperatif, inklusif, terbuka, transparan dan menghormati hukum internasional.

REFERENSI

Adducul, L. A. (2018, Maret). The Indo-Pacific Construct in Australia's White Papers: Reflections for

- ASEAN-Australia Future Strategic Partnership. *CIRSS (Center for International Relations & Strategic Studies) Commentaries*, *V*(6).
- Agastia, I. G., & Perwita, B. (2015). Jokowi's Maritim Axis Change and Continuity of Indonesia's Role in Indo-Pacific. *Journal of ASEAN Studies*, *3*(1), 33-41.
- Al-Syahrin, M. N. (2018). Kebijakan Poros Maritim Jokowi dan Sinergitas Strategi Ekonomi dan Keamanan Laut Indonesia. *Jurnal Indonesian Perspective*, *3*(1), 1-17.
- Andre, R. (2021, Agustus 16). *Kementerian Pertahanan Dapat Alokasi Rp 133,9 Triliun di RAPBN 2022*. Dipetik September 08, 2021, dari Kompas:
<https://money.kompas.com/read/2021/08/16/151325326/kementerian-pertahanan-dapat-alokasi-rp-1339-triliun-di-rapbn-2022?page=all>
- Anwar, D. F. (2020). Indonesia and The ASEAN Outlook om The Indo-Pacific. *Jurnal International Affairs*, *96*(1), 111-129.
- Armawi, A. (2019). Eksistensi TNI dalam Menghadapi Ancaman Militer dan Nir Militer Multidimensional di Era Milenial. *Media Informasi Kementerian Pertahanan*, 5-10.
- Ayres, A. (2019, Januari 22). *The U.S. Indo-Pacific Strategy Needs More Indian Ocean*. Dipetik September 09, 2021, dari Council on Foreign Relations:
<https://www.cfr.org/expert-brief/us-indo-pacific-strategy-needs-more-indian-ocean>
- Aziza, K. S. (2017, Juli 16). *Beijing Protes Indonesia Ubah Laut China Selatan Jadi Laut Natuna Utara*. Dipetik Oktober 06, 2021, dari Kompas:
<https://money.kompas.com/read/2017/07/16/113255326/beijing-protes-indonesia-ubah-laut-china-selatan-jadi-laut-natuna>
- Bappenas. (2018). Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia: Triwulan I Tahun 2018. *Jurnal Kedeputan Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas*, *2*(1), 1-145.
- Baylis, J. (2012). *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations*. Oxford: Oxford University Press.
- BBC News Indonesia. (2020, Januari 06). *Natuna: Pemerintah Indonesia didesak tarik dubes dari Beijing dan tinjau ulang seluruh proyek dengan China*. Dipetik Oktober 06, 2021, dari BBC News Indonesia:
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50999466>
- BBC News Indonesia. (2021, Maret 22). *Sengketa Laut China Selatan: 'Armada Kapal Ikan' China bikin Filipina Khawatir*. (BBC News Indonesia) Dipetik Oktober 06, 2021, dari
<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-56479672>
- Bijian, Z. (2005). China's Peaceful Rise to Great-Power Status. *Foreign Affairs*, *84*(5), 18-24.
- Buzan, B., & al, e. (1993). *Identity, Migration, and the New Security*

- Agenda in Europe*. London: Pinter.
- Buzan, B., & Herring, E. (1998). *The Arms Dynamic in World Politics*. Boulder: Lynne Rienner.
- Buzan, B., Waever, O., & Wilde, J. d. (1998). *Security: A New Framework for Analysis*. Colorado: Lynne Rienner Publishers Inc.
- Connelly, A. L. (2017, April). Indonesia di Laut Cina Selatan: Berjalan Sendiri. *Lowy Institute for International Policy*, 1-16.
- Debora, Y. (2017, Juli 22). *Akademisi: Peta Baru Indonesia Bentuk Ketegasan Kedaulatan*. Dipetik Oktober 06, 2021, dari Tirto: <https://tirto.id/akademisi-peta-baru-indonesia-bentuk-ketegasan-kedaulatan-ctfA>
- Debora, Y. (2021, September 23). *Kekuatan Militer Indonesia di Mata Dunia 2021: Tentara & Alutsista*. Dipetik Oktober 05, 2021, dari Tirto: <https://tirto.id/kekuatan-militer-indonesia-di-mata-dunia-2021-tentara-alutsista-gjth>
- Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN. (2019, Juni 24). *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific Disepakati pada KTT ASEAN ke-34*. Dipetik Oktober 05, 2021, dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia: <https://kemlu.go.id/portal/id/read/395/berita/asean-outlook-on-the-indo-pacific-disepakati-pada-ktt-asean-ke-34>
- Djalal, D. P. (1996). *The Geopolitics of Indonesia's Maritime Territorial Policy*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies.
- Djankov dan Miner. (2016). *China's Belt and Road Initiative: Motives, Scope, and Challenges*. Washington DC: Peterson Institute for International Economics.
- Fathun, L. M. (2016, Juli). Pengaruh Peningkatan Kekuatan Militer Tiongkok terhadap Keamanan Stabilitas Regional Asia Timur. *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 2(2), 193-195.
- Global Security. (2021, Agustus 01). *China's Defense Budget*. Dipetik September 02, 2021, dari Global Security: <https://www.globalsecurity.org/military/world/china/budget.htm>
- Global Times. (2020, Mei 22). *China's defense budget 2011-2020*. Dipetik September 02, 2021, dari Global Times: <https://www.globaltimes.cn/content/1189148.shtml>
- Goh, E. (2005). Meeting the China Challenge: The U.S in Southeast Asian Regional Security Strategies. *East-West Center Washington*, 31.
- Grady, J. (2016, September 23). *Geographer: China's Claim to South China Sea Not Rooted in History*. Diambil kembali dari USNINEWS: <https://news.usni.org/2016/09/23/geographer-chinas-claim-south-china-sea-not-rooted-history-british-geographer-journalist->

- described-chinas-claims-large-swaths-seas-land-formations-off-co
- Hendrajit. (2019, Oktober 21). *Konsepsi Indo-Pasifik dan Belt Road Initiatives: AS dan Cina Sama-Sama Bermaksud Menyeret Negara-Negara Lemah Mengikuti Kepentingan Globalnya*. Dipetik September 09, 2021, dari The Global Review: <https://theglobalreview.com/konsepsi-indo-pasifik-dan-belt-road-initiatives-as-dan-cina-sama-sama-bermaksud-menyeret-negara-negara-lemah-mengikuti-kepentingan-globalnya/>
- Herz, J. H. (1950). Idealist Internationalism and the Security Dilemma. *World Politics*, 2(2), 98-99.
- Hillman, J. (2018). *China's Belt and Road Initiative: Five Years Later*. Washington DC: CSIS: Center for Strategic and International Studies.
- Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2018, April 28). *Presiden: Kerja Sama Indo-Pasifik Harus Inklusif dan Kedepankan Sentralitas ASEAN*. Dipetik September 08, 2021, dari Sekretariat Kabinet Republik Indonesia: <https://setkab.go.id/presiden-kerja-sama-indo-pasifik-harus-inklusif-dan-kedepankan-sentralitas-asean/>
- Ikeshima, T. (2013). China's Dashed Line in the South China Sea: Legal Limits and Future Prospects. *Waseda Global Forum* (10), 17-50.
- Iriawan, S. (2018, Juli-Desember). Diskursus Indo-Pasifik: Hegemoni Amerika Persaingan Strategis, Hingga Transformasi Geopolitik Kawasan. *MANDALA: Jurnal Hubungan Internasional*, 1(2), 282-284.
- Jaringan Pemberitaan Nusantara Negeriku. (2020, Januari 06). *Natuna Memanas, Skuadron 12 dan 16 Siap Terima Perintah Panglima TNI*. Dipetik Oktober 05, 2021, dari JPNN: <https://www.jpnn.com/news/natuna-memanas-skuadron-12-dan-16-siap-terima-perintah-panglima-tni>
- Jurnal Maritim. (2017, Juli 19). *Penamaan "Laut Natuna Utara" Tidak Ganggu Teritorial Negara Lain*. Diambil kembali dari Jurnal Maritim: <https://jurnalmaritim.com/penamaan-laut-natuna-utara-tidak-ganggu-teritorial-negara-lain/>
- Khurana, G. S. (2017, November 14). *The Indo-Pacific Concept: Retrospect and Prospect*. Dipetik September 09, 2021, dari Center for International Maritime Security: <https://cimsec.org/indo-pacific-concept-retrospect-prospect/>
- Ki-Moon, B. (2009). *Submission by the PRC to the UN Commission on the Limits of the Continental Shelf*. New York: United Nations.
- Korwa, J. R. (2019, April-September). Kebangkitan China melalui Belt and Road Initiative dan (Re)konstruksi Hubungan Internasional dalam Sistem Westphalia. *JURNAL*

- HUBUNGAN INTERNASIONAL*, 8(1), 1-9.
- Lamont, C. (2015). *Research Methods in International Relations*. London: SAGE Publishing.
- Lisbet. (2012, Maret). Peningkatan Kekuatan Militer China. *INFO Singkat: Hubungan Internasional*, IV(05), 5-8.
- Marsetio, L. (2021, Juli 09). *Pengerahan Milisi Laut dalam sengketa di Laut China Selatan*. Diambil kembali dari Antara News: <https://www.antarane.ws.com/berita/2257390/pengerahan-milisi-laut-dalam-sengketa-di-laut-china-selatan>
- Mearsheimer, J. (2007). *International Relations Theories: Discipline and Diversity*. Oxford : Oxford University Press.
- Meyer, P. K., Nurmandi, A., & Agustiyara, A. (2019). Indonesia's swift securitization of the Natuna Islands how Jakarta countered China's claims in the South China Sea. *Asian Journal of Political Science*. doi:doi.org/10.1080/02185377.2019.1590724
- Michel, D., & Passarelli, R. (2014). *Sea Change: Evolving Maritime Geopolitics in the Indo-Pacific Region*. Washington DC: Stimson Center.
- Mishra, M. K. (2019, Februari 01). *Mengapa Kawasan indo-Pasifik jadi Titik Panas Global*. Dipetik Desember 14, 2021, dari Mata Mata Poltik: <https://www.matamatapolitik.com/analisis-mengapa-kawasan-indo-pasifik-jadi-titik-panas-global/>
- Mishra, M. K. (2019, Februari 01). *Mengapa Kawasan Indo-Pasifik Jadi Titik Panas Global*. Dipetik September 09, 2021, dari Mata-Mata Politik: <https://www.matamatapolitik.com/analisis-mengapa-kawasan-indo-pasifik-jadi-titik-panas-global/>
- Montratama, I. (2016). Rekonstruksi Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Dinamika Lingkungan Strategis Indo-Pasifik Abad Ke-21. *Intermestic: Journal of International Studies*, 1(1), 36-61.
- Morrison, W. M. (2019). *China's Economic Rise: History, Trends, Challenges, and Implications for the United States*. Washington DC: Congressional Research Service.
- Muhaimin, R. (2018, Juni). Kebijakan Sekuritisasi dan Persepsi Ancaman di Laut Natuna Utara. *Jurnal Politica*, 9, 24-25.
- Mujiburrahman, & Effendi, S. A. (2021, Mei). Budget Issue Brief: Politik dan Keamanan. *Pusat Kajian Anggaran: Badan Keahlian DPR RI*, 01(7), 1-2.
- Natalegawa, M. (2013, Mei 20). *An Indonesian perspective on the Indo-Pacific*. Dipetik September 07, 2021, dari The Jakarta Post: <https://www.thejakartapost.com/news/2013/05/20/an-indonesian-perspective-indo-pacific.html>
- Palit, A., & Sano, S. (2018, Desember). *The United States' Free and Open*

- Indo-Pacific Strategy: Challenges for India and Japan. *ISAS (Institute of South Asian Studies) Insight*, 524(4), 1-6.
- Pamungkas, W. A. (2016). Tinjauan Hukum Internasional terhadap Reklamasi Pulau-Pulau yang Dipersengketakan di Laut China Selatan oleh Republik Rakyat Tiongkok. *Media Neliti*, 1-25.
- Pangestu, L. G., Hikmawan, R., & Fathun, L. M. (2021, Juni). Strategi Indonesia Mewujudkan ASEAN Outlook on Indo-Pasifik (AOIP) untuk Menciptakan Stabilitas di Kawasan Indo-Pasifik. *Proyeksi: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 26(1), 1-22.
- Pratomo, H. B. (2017, Juli 14). *Pemerintah ganti nama Laut China Selatan jadi Laut Natuna Utara*. Dipetik Oktober 06, 2021, dari Merdeka: <https://www.merdeka.com/uang/pe-merintah-ganti-nama-laut-china-selatan-jadi-laut-natuna-utara.html>
- Priangani, A., & Hattu, J. A. (2020, Februari). Strategi RRC dalam Dinamika Konflik di Laut China Selatan. *Jurnal Academia Praja*, 3(1), 113-123.
- Purwanto, A. J. (2010, Juni). Peningkatan Anggaran Militer Cina dan Implikasinya terhadap Keamanan di Asia Timur. *SPEKTRUM: Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional*, 7(1), 1-14.
- Putra, T. S., Samekto, A., & Hardiwinoto, S. (2016). Reklamasi Pulau Republik Rakyat Tiongkok di Laut Cina Selatan: Suatu Analisis terhadap Status Penambahan Wilayah dan Dampak terhadap Jalur Pelayaran Internasional. *Diponegoro Law Review*, 5(2), 1-13.
- Putri, C. A. (2021, September 08). *Di balik Alasan Dana Covid Turun & Naiknya Anggaran Prabowo*. Dipetik Oktober 05, 2021, dari CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210908095926-4-274505/di-balik-alasan-dana-covid-turun-naiknya-anggaran-prabowo>
- Qinguo, H. (2018). *Impact of China's 40 Years Reform and Opening-up to Itself and the Whole World*. Bahamas: Embassy of China. Dipetik September 02, 2021, dari <http://bs.china-embassy.org/eng/sgxw/t1600952.htm>
- Rahman, H. Y. (2019). Kebijakan Pemerintah terhadap Belt and Road Initiative (BRI) dalam Paradigma Ekonomi Syariah. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 11(2), 173-190.
- Ratriani, V. R. (2020, Januari 13). *Cerita panjang konflik China-Indonesia di Laut Natuna*. Dipetik Oktober 06, 2021, dari Kontan: <https://nasional.kontan.co.id/news/cerita-panjang-konflik-china-indonesia-di-laut-natuna?page=all>
- Rolland, N., & Carson, B. (2019, Maret 05). *Jaw-Jaw: The Geo-Economic Challenge of China's Belt and Road Initiative*. (Texas National

- Security Review) Dipetik Oktober 06, 2021, dari <https://warontherocks.com/2019/03/jaw-jaw-the-geo-economic-challenge-of-chinas-belt-and-road-initiative/>
- Roza, R. (2019). Pandangan ASEAN terhadap Indo-Pasifik. *Bidang Hubungan Internasional: Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis*, 11(12), 7-12.
- Ruyat, Y. (2017, Maret). Peran Indonesia dalam Menjaga Wilayah Laut Natuna dan Menyelesaikan Konflik Laut Tiongkok Selatan. 29, hal. 67-73.
- Santi, N. (2018, Januari 26). *Jokowi Perkenalkan Konsep Indo-Pasifik di KTT ASEAN-India*. Dipetik September 07, 2021, dari CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180126074522-113-271697/jokowi-perkenalkan-konsep-indo-pasifik-di-ktt-asean-india>
- Saputra, P. N., & Sudirman, A. (2020). Pengembangan Konsep “Indo-Pasifik”: Sebuah Konstruksi Geopolitik Indonesia di Kawasan Melalui ASEAN. *Sospol: Jurnal Sosial Politik*, 6(2), 214-224.
- Satris, R. (2015, Januari). Peningkatan Anggaran Persenjataan Militer China sebagai Bagian dari Security Dilemma di Kawasan Asia Pasifik. *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 1(1), 95-103.
- Scott, D. (2019). Indonesia Grapples with the Indo-Pacific: Outreach, Strategic Discourse, and Diplomacy. *Journal of Current Southeast Asia Affairs*, 1-24.
- Sebayang, R. (2020, Januari 06). *Ramai-ramai Negara ASEAN Geram Karena Klaim Laut China*. Dipetik Oktober 05, 2021, dari CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200106140946-4-127958/ramai-ramai-negara-asean-geram-karena-klaim-laut-china>
- Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia. (2020, Juli 09). *Urgensi Peran Indonesia di Indo-Pasifik*. Dipetik September 09, 2021, dari Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia: <http://setnas-asean.id/news/read/urgensi-peran-indonesia-di-indo-pasifik>
- Sharma dan Kundu. (2016). *China's One Belt One Road: Initiative, Challenges and Prospects*. New Delhi: Vij Books India Private Limited.
- Sinaga, L. C. (2011, Maret 10). *Menilik Alur Laut Kepulauan Indonesia II*. (Pusat Penelitian Politik: The Center for Political Studies) Dipetik Oktober 06, 2021, dari <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-1/politik-internasional/413-menilik-alur-laut-kepulauan-indonesia-ii>
- Sinaga, S. S. (2021, Juni 03). *Infografis Belanja Alutsista TNI ala Menhan Prabowo*. Dipetik Oktober 05, 2021, dari Liputan 6: <https://www.liputan6.com/news/read/4572203/infografis-belanja-alutsista-tni-ala-menhan-prabowo>

- Suharman, Y., & Pramono, S. (2021). Strategi Kebangkitan Ekonomi Tiongkok dan Pendekatan Long Cycle Transisi Kekuasaan Politik Dunia. *SPEKTRUM*, 18(1), 1-2.
- Sukma, I. M., & Perwita, A. A. (2018, Januari-Juni). The Implementation of Australia's Maritime Defense Strategy in Response to China's Military Modernization in the Indo-Pasific Region (2013-2016). *Jurnal Asia Pacific Studies*, 2(1), 86-106.
- Sulistiyani, Y. A., Pertiwi, A. C., & Sari, M. I. (2021). Respons Indonesia Terhadap Sengketa Laut China Selatan Semasa Pemerintahan Joko Widodo. *Politica*, 12(1), 85-87.
- The White House. (2017). *National Security Strategy of the United States of America*. Washington DC: The White House. Dipetik September 02, 2021, dari <https://trumpwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf>
- Trihartono, A., Indriastuti, S., & Nisya, C. (2019). *Keamanan dan Sekuritisasi dalam Hubungan Internasional*. Depok: Melvana Publishing.
- Tuathail, G. Ó., & Agnew, J. (1992, Maret). Geopolitics and discourse: Practical geopolitical reasoning in American foreign policy. *Political Geography*, 11(2), 190-204.
- U.S. Department of State . (2014). *Limits in the Seas*. Washington DC: Office of Ocean and Polar Affairs.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 3. *Pasal 1 Ayat 1*.
- US Department of State. (2019, November 22). *U.S. Relations With Cuba*. Diambil kembali dari US Department of State: <https://www.state.gov/u-s-relations-with-cuba/>
- Waltz, K. (1979). *Theory of International Politics*. California: Addison-Wesley Publishing Company.
- Wibowo, A. D. (2017, November 01). *Pembaruan Peta NKRI*. Diambil kembali dari Katadata: <https://katadata.co.id/anshar/infografik/5e9a562fa824f/peta-baru-nkri>
- Wiranto, S. (2016). *Resolusi Konflik Menghadapi Sengketa Laut Tiongkok Selatan dari Perspektif Hukum Internasional*. Jakarta: Leutikaprio.
- World Bank. (2018). *The World Bank In China*. Dipetik September 02, 2021, dari <https://www.worldbank.org/en/country/china/overview#1>
- Wulandari, K. T., Sushanti, S., & Putri, P. K. (2021, Juni 17). Kepentingan Indonesia dalam Menginisiasi Pembentukan ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP) Tahun 2017. *Jurnal Hubungan Internasional*, 2(1), 1-15.
- Zahara, E., & Rizky, A. (2020, April). *Anggaran Pertahanan Indonesia. Analisis Ringkas Cepat: Pusat Kajian Anggaran badan Keahlian*

Sekretariat Jenderal DPR RI 2020,
1-6.